

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Adnyani, N.K.S., (2015). Pengantar Ilmu Hukum Dalam Telaah Teori dan Praktik. *Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Arba. (2016). *Hukum Agraria Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Armian, M. (2022). *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (C. Fahmi, Ed.). Lembaga Konstitusi Indonesia.
- Ardiantoro, J., & Faiz Maulana, M. (2025). *Dasar-Dasar Metode Penelitian* (N. Amanulloh, Ed.; 1st ed.). Diva Press.
- Friedman, L.M., (1975). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The legal System A Social Science Perspective)*. New York: Ressel Sage Foundation.
- Gomes, M., Madaeira Soares, I., & Arauijo, A. natalino C. R. A. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif* (W. Yuliani, Ed.). CV. Angkasa Media Literasi.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafik.
- Isnaini and Lubis, A.A., (2022). *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Jamilah, L. (2021). *Hukum Agraria* (1st ed.). Unisba Press.
- Jamilah, L., & Firmansyah, A. (2024). *Dinamika Hak-Hak Atas Tanah Di Indonesia* (1st ed., Vol. 1). UPT. Publikasi Ilmiah UNISBA.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PT. Rineka Cipta.

- Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Moelong, L. (2004). *Edisi Revisi Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, H. (2002). *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah*. Penerbit Mandar Maju.
- Royani, E. (2025). *Metode Penelitian Hukum*.
- Rahardjo, S., (1982). *Ilmu Hukum*. Bandung: Bandung : Alumni.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugoyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.
- Sutedi, A., (1996). *Sertifikat hak atas tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrani, R., (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tehupeiory, A. (2023). *Asas-Asas Hukum Agraria* (I. Jatmoko, Ed.; I). UKI Press.
- Windia, & Sudantara, I. K. (2017). *Pengantar Hukum Adat Bali, Swasta Nulus Bekerjasama Dengan Bali Santi, Pusat pelayanan Konsultasi Adat Dan Budaya Bali* . LPPM Unud Puslit Hukum Adat.

Skripsi

Kurniawan, R. (2020). *Kekuatan Hukum Girik Sebagai Jaminan Kredit Ditinjau Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Perbankan.*

Pambudi, D. P. (2025). *Analisis Yuridis Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan.*

Rastrapati, K. B. (2024). *Implementasi pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Terhadap Sengketa Tanah Di desa Adat Guwang Kabupaten Gianyar*

Ronalisco, R. (2012). *Girik Sebagai Obyek Jaminan Utang dan perlindungan Terhadap Kreditur (Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/26/PBI/2011 Tanggal 28 Desember 2011).*

Windriana, Y. (2023). *Kepastian Hukum Petok D Dikaitkan dengan Prosedur untuk Mendapatkan Sertipikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan Nomor 53/PDT/2019/PT SBY).*

Artikel Elektronik

Bali, P., (2026). Profil Kabupaten Buleleng. *TaruBali*. [online] Available at: <https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng/> [Accessed 9 March 2026].

BPN, 2023. Sekilas Tentang Kantah Buleleng. *sipetarung.bpnbuleleng*. [online] Available at: <https://sipetarung.bpnbuleleng.id/profil-kantah> [Accessed 9 March 2026].

Mandala, S. (2015, October 28). Tanah adat di Bali, Perlindungan dan pengakuan Pemerintah. *Kronik Hukum Di RRI Singaraja*.

<https://id.scribd.com/doc/305900169/tanah-adat-bali>

Nyani, K. K. (2023, July 14). Kampung Keluarga Berkualitas Desa Padangbulia.

Bkkbn. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/66447/padangbulia#:~:text=Gambaran%20Umum,Selatan%20berbatasan%20dengan%20Desa%20Pegayaman>.

Prema, M. J. (2024, May 28). Hilangnya Sejumlah Tanah Adat di Bali. *Indonesia*

by Tempo. <https://www.indonesiana.id/read/172884/hilangnya-sejumlah-tanah-adat-di-bali>

Simanjuntak, T. E. (2024, June 4). Kiat-kiat membeli Tanah Girik yang aman.

Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kiat-kiat-membeli-tanah-girik-yang-aman-cl1360/>

Sukasada, A., 2018. Sejarah Desa Padangbulia. *Padangbulia.Wordpress*. [online]

Availableat: <https://sukasada.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sejarah-desa-padangbulia-21> [Accessed 9 March 2026].

Artikel dalam Jurnal

Adnyani, N.K.S., (2021). Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan

Masyarakat Hukum Adat Kajian pengaturan Subak Dalam Perspektif

Hukum Negara. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2).

- Apriani, D. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239.
- Avelina, M., Dantes, K.F, & Adnyani, N.K. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).
- BPN, 2023. *laporan Kinerja kantor pertanahan Kabupaten Buleleng*. kabupaten Buleleng.
- Dantes, K.F. and Hadi, I.G.A.A.H., (2020). Legal Basis Analysis of Imposition of Land and Building Tax with Tax Object Selling Value. In: *ICLSSE*. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dantes, K. F. (2021). Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 9, Issue 3).
- Dantes, K.F. and Hadi, I.G.A.A., (2021). Dasar Hukum Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1).
- Dantes, K.F., Hadi, I G.A.A. and Kusuma, P.R.A., (2024). Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Bentuk Ganti Kerugian pada Pengadaan Tanah Berskala Kecil Berbasis Keadilan di Kabupaten Buleleng. *Senari*, 9.

- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefisian dan Penguatas Kedudukan. *Recht Vinding*, 8(3).
- Farida, K. (2019). *Kekuatan Hukum Petok D Sebagai Alat Bukti Hak Milik Berdasarkan Pp Nomor 24 / 1997*.
- Hemamalini, K., & Suhardi, U. (2015). Dinamika Perkawinan Adat Bali Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. *Dharmasmrti*, 8(26), 1–135.
- Hendriatiningsih, S., Budiarta, A., & Hernandi, A. (2008). Masyarakat Dan Tanah Adat Di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Sosioteknologi*, 7(15).
- Hidayah, N. Y., Abdi, S., & Daim, N. A. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Atas Tanah Petok D Menurut Hukum Agraria Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(1).
- Ilham, M., Irvan, R. muhammad, Manalu, B.S. & Tarina, D.D.Y., (2025). Perlindungan Hukum dan Mekanisme Peralihan Hak atas Tanah terhadap Pihak yang Menguasai Tanpa Hak Formal (Bezit): Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/2017. *Journal Of legal Society*, 1(2).
- Jayantari, & Wijaya. (2017). Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe desa Di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah). *Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 1(1), 33–39.

- Kristiani, V. (2021). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Kajian Dan Implementasi). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Majiburohman, D.A., (2021). Transformasi dari kertas ke elektronik: Telaah yuridis dan teknis sertipikat tanah elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), pp.57–67.
- Natashia. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Pertanian Yang Berdomisili Di Luar Kecamatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Rugi. *Gagasan Hukum*, 2(2).
- Pernia, A.A., (2021). Peralihan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perspektif penegakan hukum. *Rectial Review*, 3(2).
- Putra, N. irfan D. S. P., & Alfarisi, S. (2022). Jaminan Hukum Terkait Pencatatan Sertifikat Kepemilikan Tanah. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1).
- Putri, M.K.R., 2022. Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat Yang Diklaim Penguasaannya Oleh Subjek Hukum Perorangan Di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali. *Indonesian Notary*, 4(1), p.27.
- Pricilla, S., Sumendap, R., & Soerodjo, I. (2024). Kepastian Hukum Atas Tanah Bekas Milik Adat Ditinjau Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 2113.
- Ratrismanti, L. (2025). Implikasi Yuridis Kepemilikan Letter C, Patuk D, Dan Landrente Pasca Berlakunya PP 18 2021. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 19–30.

- Retnowati, T., & Boediningsih, W. (2023). Kekuatan Hukum Pembeli Tanah Petok D Yang Tidak Diakui Jual Belinya Oleh Ahli Waris. *Spirit Pro Patria (E-Jurnal)*, 9(1).
- Rivaldi, D., Muhibbin, M., & Anadi, Y. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Sertifikat Tanah) Dari Buku Letter C Dan Petok D Sebagai Jaminan Kepastian Hukum. *Dinamika*, 29(2).
- Rohmah, C. (2025). Kekuatan Hukum Atas Tanah Petok D/Girik Yang Disertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Dinamika*, 31(1).
- Salehah, A. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Sertipikat Hak Milik Atas Tanah. *JIHHP*, 5(5).
- Santosa, G. (2019). Perbedaan badan hukum republik dan badan hukum privat. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2).
- Sappe, S., Latturete, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 78.
- Sari, I. (2017). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1).
- Sekoningtias, A. A., & Octarina, N. F. (2021). Aspek Hukum Pengikatan Jual Beli Tanah Petok D Menurut Kuhperdata. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1303–1316.
- Sugeng, T. A. (2021). Fungsi Buku Tanah Desa Sebagai Landasan Yuridis Awal Alat Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah The Function Of The Village

Land Book As The Initial Jurisdictional Evidence Tool Of Land Ownership Rights. *Cermin: Jurnal Penelitian*, 5(2).

Suhattanto, M.A., Sarjita, S., Sukayadi, S. and Majiburohman, D.A., (2021).

Kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), pp.100–114.

Surayya, I., (2020). Ideologi Hukum Pendaftaran Tanah Dalam Sistem Hukum Agraria. *Jatiswara*, 35(1).

Tri, L. (2025). Perlindungan Hukum Atas Tanah Berstatus Letter C Dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf. *Jurnal Akta Notaris*, 4(1), 67–86.

Ulfah, M., Gunawan, B. P., & Rohmah, N. (2019). Kedudukan Petok D Dalam Proses Pendaftaran Tanah. *Jurnal Reformasi Hukum*, 2(1).

Vierlyana, A. (2023). Analisis Sistem Agraria Feodalisme Dan Hak-Hak Yang Diperoleh Masyarakat Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(1).

Virgonia, V., Girsang, K., Hombing, M. A. B. br, Lantong, A. N., & Heristianora, W. (2020). Hak Menguasai Dari Desa Atas Tanah, Hak-Hak Individual Atas Tanah, Konversi Hak Atas Tanah Swapraja. *Jurnal Hukum Lex Generalis.*, 1(6).

Wulansari, H., Junarto, R. and Mujiburohman, D.A., (2018). mewujudkan Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. *Riau Law Journal*, 1(5), pp.61–71.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).
Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545*)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Undang-Undang Pendaftaran Properti (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696*)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran tanah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali

Awig-Awig Desa Pakraman Padangbulia